

ANALISIS MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH ACEH (Studi di Pemerintah Kabupaten Aceh  
Utara)

**Kamaruddin dan Subhani**

SEJARAH ACEH, ANTARA DAMAI DAN PERANG  
MEMAKNAI INDONESIA

**Ibrahim Chalid**

PERAN ATJEH SINBUN DALAM KEMERDEKAAN  
INDONESIA (1942-1945)

**Masriadi**

GENDER PERFORMAATIVITY IN WEBSITE "ayonikah.com"

**Awaludin Arifin**

MEDIA LITERASI PROSES MENUJU PENDIDIKAN  
MULTIKULTURAL

**Harinawati**

APLIKASI PERFORMA KOMUNIKASI DALAM BUDAYA  
ORGANISASI PADA PT PUPUK ISKANDAR MUDA

**Roslina Rahmi**

STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN PT HONDA ARISTA  
DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN MOBIL HONDA.

**Rafika a'la**

**ANALISIS MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH ACEH**  
(Studi di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)

Oleh:  
Kamaruddin  
Subhani

**Abstrak**

Kajian ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman secara umum tentang model komunikasi dalam proses pembangunan yang berpusat pada manusia sesuai dengan karakteristik masyarakat serta tujuan dari pemerintah Aceh khususnya pemerintah Aceh Utara. Penerapan model komunikasi dan paradigma pembangunan yang relevan dengan karakteristik daerah menjadi penting. Mengingat model komunikasi yang tepat berfungsi sekaligus berperan besar dalam rangka mendorong proses pembangunan yang partisipatif. Sebagai proses pembangunan, komunikasi berperan menghubungkan bagian-bagian dalam masyarakat, dalam pemerintah maupun diantara keduanya. Komunikasi bagai aliran darah yang mengalirkan pesan-pesan pembangunan. Dengan menemukan dan menganalisis model-model komunikasi pembangunan, sehingga dapat menemukan model, metode, bentuk dan strategi dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan paradigma kritis. Data kajian diperoleh dari pengamatan, wawancara, fokus group diskusi dan kajian dokumen serta analisis realitas model-model komunikasi pembangunan yang selama ini berlangsung. Temuan awal kajian ini menunjukkan bahwa pemerintah Aceh Utara sampai saat ini masih menggunakan kombinasi dari berbagai model-model komunikasi pembangunan, belum memiliki roadmap model komunikasi pembangunan yang relevan dengan karakteristik masyarakat dan daerah. Temuan kajian ini diharapkan bermanfaat dalam melahirkan solusi model komunikasi pembangunan dan paradigma pembangunan yang relevan bagi Pemerintah Aceh khususnya Aceh Utara sekaligus dapat memperkaya temuan praktis dan teoritis.

Kata Kunci: Komunikasi pembangunan, model, partisipasi masyarakat, paradigma kritis.

## PENDAHULUAN

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling mengisi, saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Keduanya tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pembangunan tanpa model komunikasi yang efektif dan tepat, dapat dipastikan tidak akan berjalan dengan baik, demikian juga sebaliknya. Komunikasi dan pembangunan bagaikan aliran darah yang mengisi seluruh bagian tubuh dalam pembangunan.

Proses pembangunan merupakan suatu proses yang ditumbuhkan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Meningkatkan partisipasi aktif rakyat, menumbuhkan kepercayaan serta inisiatif rakyat dalam setiap proses pembangunan. Tujuan utamanya jelas untuk kemajuan sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Tentu upaya menumbuhkan kondisi-kondisi tersebut dibutuhkan proses dan model komunikasi yang tepat sesuai dengan karakteristik wilayah dan rakyat.

Pembangunan merupakan sebagai pertumbuhan plus perubahan ke arah yang lebih baik. Merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972). Surna, 1992, memberikan batasan tentang pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pembangunan sejatinya menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Seperti kemiskinan, pengangguran dan kelompok rentan perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif. Longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia, yang menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Komitment dalam meningkatkan peran rakyat, pertumbuhan ekonomi, keseimbangan sosial dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari

hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada rakyat yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari pembangunan yang mengutamakan manusia atau rakyat.

Proses pembangunan pada hakikatnya memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi-aspirasi dan harapan individu dan kolektif, dalam konsep tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan rakyat setempat yang sedang berlaku. Tujuan objektif dalam proses pembangunan pada intinya memberantas kemiskinan absolut, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi rakyat secara nyata untuk mencapai kesejahteraan bersama. Proses ini, semestinya diprioritaskan pada daerah yang tidak menguntungkan dan kelompok-kelompok sosial yang rawan terpengaruh, termasuk wanita, anak-anak, generasi muda yang tidak mampu, lanjut usia, dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa rakyat mesti menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro; sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional. Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas.

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, pemungkin, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Dalam posisi sedemikian, maka permasalahan pembangunan ditangani oleh rakyat atas fasilitasi dari pemerintah.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam berbagai program, bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya sebab partisipasi tidak tumbuh dengan sendirinya. Sebagaimana dikemukakan Supriatna (1985:32) bahwa partisipasi rakyat dalam kegiatan pembangunan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan secara terus-menerus secara tekun dan diberikan kesempatan untuk tumbuh, berakar dan berkembang secara

wajar sehingga rakyat mempunyai sikap, orientasi, persepsi dan identifikasi selaku subjek di dalam penyelenggaraan pembangunan. Upaya menumbuhkan partisipasi aktif rakyat dalam proses pembangunan, membutuhkan model dan strategi proses pembangunan yang tepat sesuai dengan karakter wilayah dan rakyat setempat.

Pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara dengan beragam karakteristik rakyatnya juga membutuhkan model dan strategi dalam setiap gerak pembangunan dari tahun ketahun. Dari hasil observasi baik secara langsung maupun tidak langsung, wawancara dan focus group discussion (FGD) yang dilakukan oleh peneliti. Memperllihatkan ada semacam disorientasi pembangunan di wilayah ini. Artinya anggaran yang besar setiap tahun, rupanya belum bisa dijadikan indikator keberhasilan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Terutama dalam partisipasi aktif, rasa memiliki, kepercayaan, rasa optimis, sinergisitas dari seluruh elemen rakyat Aceh Utara.

Semua daerah memiliki permasalahan dalam proses pembangunan dan relatif berbeda dari masing-masing daerah. Demikian juga dalam proses pembangunan di Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 27 kecamatan tersebar di 852 Gampong, dengan jumlah masyarakat mencapai 591.444 jiwa. Dengan anggaran yang besar tiap tahun dibandingkan dengan daerah atau kabupaten kota lain di Provinsi Aceh, Aceh Utara malah mencatat masalah pengangguran dan kemiskinan yang paling tinggi. Laporan BPS Aceh Utara tahun 2014 merilis tingkat pengangguran didaerah ini mencapai 17,97 persen atau 42,431 orang dan angka tersebut merupakan peringkat pertama Kabupaten pengangguran di Aceh, selain itu angka kemiskinan mencapai 21,34 persen dari jumlah penduduk Aceh Utara, 591.444 jiwa.

Selain itu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Aceh tampaknya masih belum menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Ini terlihat dari makin bertambahnya angka pengangguran sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 32.000 orang. Penurunan pekerja paling besar terjadi pada sektor konstruksi. Ini diakibatkan lambannya pekerjaan proyek pemerintahan di Aceh. Sehingga jumlah total pengangguran di Aceh per Agustus 2013 adalah 210.000 orang. Meningkat signifikan dibandingkan Agustus 2012 yang berjumlah 180.000 orang.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Aceh secara langsung telah berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Masyarakat Aceh masih jauh dari kesejahteraan, sehingga data terakhir yang diperoleh pakar ekonomi menunjukkan bahwa indeks kemiskinan di Aceh menduduki "juara" ketiga secara Nasional. Penggunaan dana minyak dan gas (Migas) dan otonomi khusus (Otsus) sejak tahun 2008 belum sepenuhnya tepat sasaran.

Padahal Undang-undang telah mengatur tentang Migas dan Otsus, Aceh mendapatkan dana Otsus 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) sejak tahun 2008 hingga 2022 dan selanjutnya menjadi 1 (satu) persen DAU dari tahun 2023 hingga 2028. Bahkan, 30 persen dari dana Migas untuk pendidikan Aceh, sementara 70 persen untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan di Aceh. Dana Otsus digunakan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta digunakan pula untuk keistimewaan Aceh. Keberadaan sejumlah pabrik vital di Kabupaten Aceh Utara, rupanya belum mampu untuk mengatasi angka kemiskinan rakyat dari 27 kecamatan. Walau, Aceh Utara dikenal sebagai daerah penghasil migas. Namun, rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan angka pengangguran yang tinggi.

Dalam suatu kesempatan wawancara, Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Jamil, juga membenarkan, angka kemiskinan di Aceh Utara mencapai 21,34 persen dari jumlah penduduk dan tingkat pengangguran mencapai 17,97 persen. Masih rendahnya mutu pendidikan dan mutu tenaga kependidikan serta masih tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan belum tersedianya pendidikan untuk menghasilkan tenaga terampil baik formal maupun non formal. Kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu belum merata, sarana dan prasarana kesehatan belum memadai dan tenaga kesehatan tidak terdistribusi dengan baik. Begitu juga, masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan dan lain-lain terutama padi yang disebabkan oleh kondisi jaringan irigasi yang belum sempurna. Demikian juga masih banyaknya ruas jalan dan jembatan dalam kondisi rusak, mengingat luasnya cakupan Aceh Utara. Memang berbagai langkah serius ditempuh dan akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya memsukkseskan pembanguna demi sejahteraan masyarakat.

Bupati Aceh Utara H. Muhammad Thaib, dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2012-2017, mengungkapkan bahwa Aceh Utara dulunya dikenal sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas). Karena terdapat sejumlah pabrik vital, seperti ExxonMobil, PT. Arun LNG, PT PIM, PT AAF dan PT KKA dan lain-lain. Namun, keberadaan pabrik vital itu masih kurang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Aceh Utara yang pernah mendapatkan julukan daerah petro dollar, sebagai penghasil Migas di wilayah Provinsi Aceh. Produksi Migas semakin menurun tingkat kemiskinan pun semakin tinggi. Artinya selama beroperasi pabrik vital di Aceh Utara, belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran masyarakat Aceh Utara.

Realitas tersebut, memang terdapat berbagai faktor penting yang perlu mendapat perhatian dan mempengaruhi partisipasi rakyat dalam pembangunan di Aceh Utara. Salah satunya adalah menyangkut proses, strategi dan model komunikasi pembangunan yang tepat. Untuk mendapat model komunikasi yang efektif tentu faktor figur pemimpin juga menjadi faktor penentu.

Dalam proses komunikasi pembangunan, juga perlu ditekankan kepada pemberdayaan. Korten, 1993, menyatakan model dan strategi pembangunan berpusat pada manusia atau rakyat, memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Upaya pembangunan rakyat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Model komunikasi pembangunan yang tepat memungkinkan suatu ide baru atau lama tersebar dan dihayati oleh rakyat, dituntut atau ditolak, berhasil atau gagal suatu pembangunan. Inilah sebabnya mengapa dalam pembangunan, komunikasi semakin penting diketahui, dipahami serta dihayati, terutama bagi penyelenggaraan pembangunan sebab mereka lebih banyak berhadapan dan berhubungan, berinteraksi, mensosialisasi, alat integrasi dan alat kekuasaan.

Pentingnya model komunikasi pembangunan yang tepat dalam proses pelaksanaan program pembangunan, selain dalam rangka mencari, mensosialisasi, berinteraksi, menemukan aspirasi rakyat dan

meningkatkan partisipasi, sehingga tercapai tujuan lanjutan pemerintahan. Proses pembangunan yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memajukan rakyatnya, tidak akan mencapai hasil yang maksimal bila tidak memperhatikan kondisi nyata rakyat yang berkaitan dengan prioritas utama tuntutan rakyat serta identifikasi dukungan partisipasi rakyat, dan hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan model komunikasi yang tepat.

Model komunikasi yang tepat antara pemerintah dengan rakyat sebagai sasaran pembangunan menjadi penting, untuk itu diperlukan model komunikasi pembangunan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Aceh Utara kearah yang maju.

Komunikasi pembangunan tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapat dukungan rakyat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan, oleh karena itu pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan model apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini dilakukan, terutama untuk mengkaji model-model komunikasi pembangunan Pemerintah Aceh khususnya Aceh Utara dalam proses pembangunan dalam meningkatkan partisipasi rakyat. Sedangkan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana model komunikasi pembangunan yang tepat bagi Pemerintah Aceh Utara dalam upaya meningkatkan partisipasi rakyat dan bagaimana hambatan dan kendala komunikasi pembangunan yang hadapi pemerintah kabupaten Aceh utara dan stakeholders pembangunan?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah (Sugiono,2005:16). Pendekatan



kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun data yang dipergunakan adalah *data primer* yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui observasi, hasil wawancara mendalam dan focus group discussion dengan beberapa pihak yang terkait. *Data sekunder* atau lebih tepat disebut sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Yaitu melalui studi perpustakaan, dokumen-dokumen dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan data *Observasi*; Metode utama dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi/pengamatan. Secara sederhana observasi/pengamatan dapat diartikan sebagai proses melihat situasi penelitian, yaitu mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif yaitu teknik penelitian dengan melakukan langsung terhadap objek yang diteliti.

*Wawancara*; Metode kedua yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data di lapangan adalah dengan wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan guna mengkonfirmasi data. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur, Bungin (2003:110) mengatakan bahwa wawancara tidak terstruktur merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti, wawancara dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif wawancara tidak terstruktur alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi.

*Focus Group Discussion (FGD)*, metode ketiga yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data di lapangan adalah dengan FGD Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berdiskusi terfokus bertatap muka secara langsung dengan beberapa informan guna menggali data dan juga

mengkonfirmasi data. Informasi dengan cara diskusi terfokus dengan beberapa informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. FGD dilakukan dilakukan secara intensif beberapa kali dengan sumber data primer penelitian.

Dokumentasi; Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian dari berbagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Menurut Schatzman dan Strauss dalam Mulyana (2001:195) bahwa dokumen merupakan bahan yang penting dalam penelitian kualitatif. Selain itu juga menurut mereka, sebagian dari metode lapangan (*field method*), peneliti dapat menggunakan dan menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek dari situasi tersebut.

Informan Penelitian, Pemerintah Aceh Utara, tokoh masyarakat yang tergabung pada lembaga swadaya masyarakat yang aktif/*new social movement*, asosiasi pembangunan dan kalangan yang peduli mengenai isu-isu Pembangunan, politisi, akademisi, Pengusaha, dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembangunan yang berdomisili di lokasi penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif**

Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.

Secara de facto Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di Batee Iliak di Samalanga. Dengan surat Keputusan Vander Geuvement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Daerah Aceh atas 6 (enam) *Afdeeling* (Kabupaten) yang dipimpin seorang Asistent Resident, salah satunya adalah

Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie (Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS dan Bappeda Aceh Utara).

*Afdeeling Noord Kust Aceh* dibagi dalam 3 (tiga) Onder Afdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai seorang Countroleur (Wedana) yaitu : 1. Onder Afdeeling Bireuen, 2. Onder Afdeeling Lhokseumawe dan 3. Onder Afdeeling Lhoksukon. Selain Onder Afdeeling tersebut terdapat juga beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik (BPS, *Aceh Utara dalam Angka 2015*)

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999. Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabuparten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen. Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 529.571 jiwa membawahi 27 kecamatan (BPS, *Aceh Utara dalam Angka 2015*).

Komposisi penduduk berdasarkan etnis di Aceh Utara diisi oleh beberapa etnis yang terbesar adalah etnis Aceh dan etnis Jawa. Mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam hampir 100%, sedikit sekali non muslim dalam komposisi beragama masyarakat di Aceh Utara. Karena itu di wilayah Aceh Utara bahkan tidak menemukan satupun sarana rumah peribadatan selain masjid, mushola dan meunasah.

Pada umumnya kondisi sosial dan budaya Kabupaten Aceh Utara masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam yang mereka anut, hal ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Aceh Utara masih memegang teguh nilai-nilai religius, seperti diadakan prosesi

pembacaan do'a-do'a, dan peusujuk merupakan proses menepung tawari, keluarga yang bersangkutan.

Sebagian besar masyarakat Aceh Utara bekerja dibidang pertanian, tingginya angka pengangguran disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM membuat tidak banyak usaha jasa dan industri yang berkembang. Berbanding terbalik pada masa lalu ketika sektor migas menjadi primadona di Aceh Utara banyak masyarakatnya yang direkrut di perusahaan-perusahaan eksplorasi migas meski hanya menempati posisi-posisi rendah. Seiring dengan berakhirnya era migas dan diperparah oleh konflik politik dan keamanan di Aceh, maka menurun pula sektor jasa dan industri yang berlokasi di Aceh Utara.

Di sisi lain, akibat konflik bersenjata berkepanjangan, yang terjadi bukan hanya di masa Daerah Operasi Militer/DOM (17 Juli 1990 – 21 Mei 1998), tapi juga kekerasan yang diciptakan para pihak berkonflik terhadap sipil ketika negara melemah (pasca pencabutan DOM 7 Agustus 1998 – 15 Agustus 2005). Bahkan ketika situasi Aceh damai, Aceh Utara juga pernah terdampak konflik pilkada yang mengorbankan masyarakat perantauan (Fasya, 2012).

Bahkan jika dirunut pasca kemerdekaan, Aceh Utara juga terdampak konflik revolusi sosial dengan pembersihan kaum *uleebalang* sehingga memiliki pengalaman konflik dan berpengaruh pada sisi keterbukaan masyarakat. Konstruksi konflik yang berkempanjangan membentuk kultur introvert, susah memercayai orang lain, modal sosial melemah akibat buruknya kualitas pendidikan, dan juga penyakit sosial merebaknya narkoba. Bahkan dalam catatan BNN, Aceh Utara termasuk daerah yang memiliki problem penggunaan narkoba tertinggi di Aceh (Fasya, 2015).

### **Keragaman, Kelompok Rentan, dan Kemiskinan**

Di Aceh Utara, keragaman komunitas tidak cukup terlihat, meskipun terdapat komposisi etnis non tempatan (Jawa, Batak, Minang, Tionghoa) dan juga etnis Aceh non (Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Timur, Aceh Barat-Selatan). Keberadaan komunitas non etnis tempatan di Aceh Utara dapat dianggap sangat minoritas. Namun selama ini tidak pernah muncul konflik dengan etnis Aceh non-tempatan. Beberapa sejarah konflik terjadi dengan etnis Jawa dan Batak yang direpresentasi sebagai kelompok penjajah di daerah Pasee.

Meskipun demikian, problem kerentanan di Aceh Utara juga dimunculkan oleh faktor kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, termasuk kasus busung lapar dan gizi buruk. Bahkan kasus gizi buruk di Aceh Utara adalah termasuk yang terburuk di seluruh Aceh. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh, pada tahun 2015 di Aceh terdapat 307 kasus gizi buruk dan 79 kasus terdapat di Aceh Utara (<http://acehportal.com/2728-2/>) buruknya kualitas kesehatan dan pendidikan di Aceh Utara menjadi penyumbang potensial kepada kemiskinan. Namun sayangnya data kemiskinan di BPS Aceh Utara tidak ditemukan.

Namun dari pencarian situs berita diketahui bahwa Aceh Utara termasuk tiga besar kabupaten termiskin di Aceh. Bahkan dari data BPS pada tahun 2013, Aceh Utara menjadi kabupaten termiskin di Aceh dengan menyumbang angka kemiskinan sebesar 20,34%, jauh di atas rata-rata provinsi Aceh saat itu yaitu 17,72%.

(<http://news.okezone.com/read/2015/08/26/340/1202661/aceh-utara-digampongk-segera-dimekarkan>).

Buruknya kesejahteraan di Aceh Utara adalah gabungan yang kompleks antara buruknya tatakelola pemerintahan, residu budaya konflik yang belum hilang, faktor infrastruktur dan rentang kendali pemerintahan yang belum efektif, dan korupsi.

### **Struktur Sosial dan Kelompok Kepentingan**

Pada dasarnya struktur sosial masyarakat *gampong* di Aceh Utara dan sama dengan struktur sosial masyarakat Aceh secara umumnya, yang diamati tidaklah memiliki perbedaan yang berarti. Beberapa pranata sosial yang sekaligus juga merupakan perangkat struktur sosial, menjadi penting dianalisis dalam proses pemetaan sosial, di antaranya adalah:

*Gampong dan Geuchik*; Secara umum orang sering memahami *gampong* sebagai desa. Pemahaman yang demikian itu tidaklah salah namun tidak sepenuhnya tepat. *Gampong* merupakan sebuah kesatuan tempat tinggal sekelompok orang yang juga menjadi satuan organisasi pemerintahan terkecil dalam struktur politik di masyarakat Aceh tradisional.

*Meunasah, Masjid dan Imuem syik serta Tengku*; *Meunasah* merupakan sebuah kesatuan tempat tinggal sekelompok orang yang ditandai oleh adanya

kesatuan tempat ibadah yang sama. Secara umum meunasah sering diartikan sebagai tempat shalat bagi sebuah masyarakat gampong. Kecuali itu, Meunasah juga merupakan sebuah pranata yang secara langsung membentuk identitas komunitas yang tidak hanya dimanfaatkan untuk shalat tapi juga aktivitas pendidikan dan sosial seperti tempat pengajian, tempat musyawarah dan pelaksanaan peringatan hari-hari besar. Mesjid sendiri merupakan rumah ibadah yang fungsi sosialnya tidaklah semikro Meunasah. Sebuah mesjid biasanya diperuntukkan bagi beberapa gampong.

*Tuha Peut dan Tuha Lapan*; Tuha Peut adalah sebuah pranata sosial yang juga ikut membentuk struktur sosial masyarakat Aceh sebagaimana dijumpai. Secara harfiah, Tuha Peut diartikan sebagai empat tetua, atau orang yang dihormati. Disamping Tuha Peut, terdapat juga Tuha Lapan. Secara etimologis, Tuha Lapan berarti tetua delapan, yang merupakan anggota perluasan dari Tuha Peut. Namun keberadaan Tuha Lapan bukan merupakan dewan tetap, tetapi dewan tambahan.

*Kemukiman*; kemukiman adalah sebuah organisasi yang menghimpun beberapa *gampong* dalam sebuah kecamatan. Pada masa lalu kemukiman hanya dianggap sebagai organisasi kultural yang mengoordinasikan beberapa *gampong* yang dianggap memiliki kedekatan dan karakter yang sama. Saat ini status kemukiman telah diledakkan. Posisinya berada di bawah struktur kecamatan.

*Kelompok Kepentingan (Interest Group)*; Kelompok-kelompok itu, diantaranya adalah: 1. Aparat Pemerintahan, 2. Aparat Keamanan, 3. Komite Peralihan Aceh (KPA / mantan anggota GAM), 4. Tokoh Masyarakat, 5. Anggota Masyarakat, 5. pengusaha Lokal, 6. Media massa, 7. Lembaga swadaya masyarakat / LSM. 8. Lembaga Pendidikan, 9. Partai Politik dan lain-lain.

### **Model dan Strategi Komunikasi Pembangunan**

Pembangunan tidak hanya sebatas pada bagaimana seharusnya dilakukan juga kepada siapa hasil pembangunan nantinya dinikmati. Akan tetapi dalam pembangunan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah pendekatan yang dilakukan. Rogers (1986) memberikan sebuah pendekatan baru pada masanya dalam pembangunan dengan memasukan partisipasi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, dalam pandangannya pembangunan ialah suatu perubahan sosial yang bersifat partisipatoris secara luas untuk meningkatkan keadaan sosial dan materi (termasuk keadilan, kebebasan dan kualitas

mayoritas masyarakat yang tinggi) melalui perolehan pada kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya.

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, emosi maupun tindakan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut (Adams, 1995).

Lebih lanjut Melkote dan Steeves (2006) menyatakan *community participation means facilitating the aktif involvement of different community groups, together with the other stakeholders involved, and the many development and research agents working with the community and decision makers*. Sehingga partisipasi yang dimaksudkan tidak hanya pada individu, tapi juga komunitas dan kelompok-kelompok komunitas yang ada di dalam masyarakat.

Tidak salah jika Paul (1987) beranggapan bahwa pembangunan partisipatif merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Sistem ini juga diakui mampu menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkit semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri (Hikmat, 2001: 48).

Dalam konteks pembangunan di Aceh Utara, partisipasi masyarakat tidak terlibat dalam segala aspek. Kecenderungan yang terjadi ialah pemerintah sebagai inisiator pembangunan menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sasaran pembangunan, bukan sebagai pelaku. Sehingga yang terjadi ialah pembangunan cenderung bersifat *up to down*. Demikian halnya dengan komunikasi pembangunan yang dijalani. Pembangunan sarana publik dan infrastruktur dalam skala besar umpunya sering mendapatkan pertentangan dalam masyarakat, terutama pembangunan yang berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam. Pertentangan ini disebabkan masyarakat tidak dihadirkan apakah sebagai tenaga kerja, ataupun pada tahap perencanaan eksplorasi.

Secara garis besar, komunikasi pembangunan yang dijalani oleh pemerintah Aceh Utara ialah melalui saluran komunikasi interpersonal. Mendiskusikannya pada tingkatan pemerintah desa, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul. Namun, jika kata sepakat tidak terjai antara kedua belah pihak, pembangunan tetap terus dijalankan

dengan alasan-alasan pragmatis dan kapitalis. Sedangkan masyarakat secara perlahan akan terjadi perubahan dari yang sebelumnya menolak, namun selanjutnya menyepakati.

Ditemui beberapa metode komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai metode dan pendekatan dalam komunikasi pembangunan kemudian menjadi hal yang sangat terpenting sebagai upaya memperluas keterlibatan partisipasi aktif masyarakat.

Antara lain; metode komunikasi pembangunan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yaitu *Participation Rural Communication Appraisal* (PRCA) dan *Participation communication Strategy Design* (PCSD). Masing-masing metode tersebut umumnya digunakan berdasarkan pada bentuk dan sasaran pembangunan itu sendiri. Namun, secara garis besar kedua metode tersebut banyak digunakan dalam komunikasi pembangunan di Aceh Utara.

Pembangunan sejatinya menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian dan proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Masalah kemiskinan, pengangguran dan kelompok rentan perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia, yang menyebabkan proses pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komitmen dalam meningkatkan peran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada rakyat yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari pembangunan yang mengutamakan manusia atau rakyat.

Hasil *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada 13 dan 15 Mei 2016 dengan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, LSM, media dan akademisi menemukan bahwa; tingginya kemiskinan dan pengangguran di Aceh Utara, salah satu penyebab utamanya ialah pola komunikasi, proses keterlibatan masyarakat, informasi yang terdistribusi belum merata kepada seluruh masyarakat. Artinya terbatasnya partisipasi masyarakat bukan dikarenakan ketidakpedulian mereka pada pembangunan, namun kelemahan pemerintah kurang menganggap penting keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat.



Prinsip pembangunan yang partisipatif menegaskan bahwa masyarakat mesti menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Hal ini membutuhkan kajian strategis tentang restrukturisasi sistem sosial pada tingkat mikro, mezzo dan makro; sehingga masyarakat lokal dapat mengembangkan potensi tanpa adanya hambatan eksternal pada struktur mezzo dan makro. Struktur mezzo yang dimaksud dapat berupa struktur pemerintah regional setingkat Kabupaten dan Propinsi; sedangkan struktur makro dapat berupa struktur pemerintah pusat atau nasional.

Namun, untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program, bukanlah hal yang mudah untuk melakukannya sebab partisipasi tidak tumbuh dengan sendirinya. Sebagaimana dikemukakan Supriatna (1985:32) bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan secara terus-menerus secara tekun dan diberikan kesempatan untuk tumbuh, berakar dan berkembang secara wajar sehingga masyarakat mempunyai sikap, orientasi, persepsi dan identifikasi selaku subjek di dalam penyelenggaraan pembangunan.

### **Participation Rural Communication Appraisal**

*Participation Rural Communication Appraisal* (PRCA) diperkenalkan pertama kali pada 1994 adalah sebuah metode riset komunikasi yang menggunakan teknik visualisasi, wawancara, dan kelompok kerja berbasis lapang untuk menghasilkan informasi. Pendekatan ini merupakan formulasi dari pendekatan-pendekatan partisipatif lainnya yang menggabungkan ide-ide dan teknik-teknik dari pendekatan kerangka kerja logis, perencanaan proyek berorientasi tujuan. (Anyaeibunam, C. et. al. 2004).

Dominasi penggunaan metode PRCA ketimbang metode komunikasi pembangunan lainnya di Aceh Utara dapat dipahami, sebab saat ini Aceh Utara tengah membangun berbagai infrastruktur publik lebih dominan ketimbang pembangunan lainnya, serta terdapat beberapa perusahaan bersekala besar yang melibatkan warga. Sehingga nilai-nilai demokrasi dalam pembangunan tidak begitu tampak dalam proses pembangunan yang dilakukan. Hal ini seperti yang disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi, bahwa Pemerintah saat ini lebih fokus pada sektor pembangunan infrastruktur, biar tidak berbentur dengan kepentingan masyarakat. Misalnya

saat pembangunan Waduk Krueng Kereuto di Aceh Utara, ada keterlibatan masyarakat lokal dalam banyak diskusi dan tenaga lokal.

Metode PRCA dalam komunikasi pembangunan di Aceh Utara dilakukan sejak awal aktifitas pembangunan yaitu pada tahap perencanaan dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan pembangunan yang direncanakan serta hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. pengumpulan informasi dianggap penting agar tidak ditemukan kemudian adanya pihak-pihak penentang pembangunan. Kesepakatan antara kedua belah pihak (masyarakat dan penggagas pembangunan) menjadi satu hal yang mutlak.

Secara praktis, metode PRCA yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Utara ialah berupa komunikasi dialogis antara komunikator dengan komunikan, yaitu masyarakat sasaran pembangunan, sharing dan belajar bersama masyarakat, sharing dan belajar bersama masyarakat. partisipasi masyarakat terwujud dalam perancangan program pembanguana, materi dan metode komunikasi yang efektif bagi pembangunan untuk menjamin kesesuaian dan kepemilikan oleh masyarakat. Komunikasi persuasif pemerintah dengan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat ialah agar pemerintah peka terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Pendekatan secara persuasif penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik.

### **Participaton Communication Strategy Design**

*Participation Communication Strategy Design (PCSD)*. Metode ini diperkenalkan pada tahun 2004 sebagai lanjutan dari strategi PRCA Sebagai suatu kelanjutan logis dari PRCA, PCSD menyertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mungkin mengarahkan pada perencanaan komunikasi efektif dan tindakan untuk meningkatkan mata pencaharian. PCSD focus pada cara-cara berpartisipasi dengan masyarakat, bagaimana menghadirkan permasalahan dan kebutuhan praktis yang diidentifikasi. Mendesain pesan dan menciptakan tema diskusi sesuai dengan prinsip media komunikasi, materi dan aktivitas -aktivitas pembangunan dan produksi. Desain strategi ini juga menentukan syarat untuk efektifitas penggunaan pendekatan komunikasi, teknik, media, materi, dan metode di antara masyarakat pedesaan. PCSD dapat digunakan pada berbagai proyek pembangunan seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, meningkatkan

pendapatan, gender, air dan sanitasi, peternakan, dan kemiskinan. (Jumrana, 2012: 30)

Secara spesifik model PCSD lebih cocok digunakan dalam proses pembangunan yang bersentuhan langsung pada program-program pembangunan kerakyatan. Yaitu, pembangunan yang berbasis masyarakat. Sebagai contoh pada program pengetesan kemiskinan pemerintah melalui SKPD terkait meminta pendapat langsung dari masyarakat terkait dengan usaha apa yang hendak dilakukannya. Program Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), rehap rumah fakir miskin, petani tambak, perani sawah dan lain-lain yang tengah digeluti oleh pemerintah Aceh Utara menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator bagi pengusaha tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan ini, terutama upaya untuk mengoptimalkan hasil sumber daya alam; pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan dan lainnya, dilakukan secara holistik dan komprehensif, walau masih terdapat berbagai kelemahan. Metode seperti ini disebut sebagai komunikasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Artinya komunikasi pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dengan pola partisipasi yang tinggi, kemudian Pemerintah Kabupaten merumuskan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, membuat program-program pembanguan dan selanjutnya di bawa ke pemerintahan pusat untuk dijadikan program-program unggulan yang dilaksanakan di Aceh Utara, disamping program-program rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, dengan bahasa lain bisa sebutkan dengan bentuk komunikasi pemerintahan yang partisipatif.

Tahapan penting terpenting melalui PCSD dalam komunikasi pembangunan ialah identifikasi persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sasaran pemberdayaan. Sehingga program kerja dan program pembangunan benar-benar bersumber dari masyarakat dan berdasarkan pada keinginan yang mereka harapkan. Pembangunan yang tidak berorientasi pada kebutuhan warga cenderung menuai persoalan di kemudian hari berupa penolakan yang dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Pada saat proses komunikasi berlangsung hal yang harus dipertimbangkan ialah, bagaimana kemasan pesan dikemas sebarang mungkin. pesan yang direncanakan dengan baik, akan lebih mudah diterima oleh warga juga sebaliknya

### **Media Komunikasi Pembangunan**

Penggunaan media komunikasi yang tepat menjadi sebuah keniscayaan dalam proses komunikasi pembangunan. Mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta luasnya jangkauan daerah serta jumlah masyarakat yang sangat banyak. Penggunaan satu media komunikasi juga salurannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan informasi pembangunan oleh warga. Keragaman media komunikasi yang dimiliki saat ini, termasuk media sosial atau new media merupakan aset dan peluang terbesar pemerintah Aceh Utara dalam mengkomunikasikan pembangunan.

Terdapat tiga bentuk media yang dimanfaatkan oleh pemerintah, yaitu media tradisional, media konvensional dan media digital (*cyber media*). Media tradisional biasanya digunakan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan yang masih sangat dekat dengan masyarakat. Namun, sejauh amatan penelitian yang peneliti lakukan, penggunaan media jenis ini sangat sulit ditemukan dalam proses komunikasi. Dalam konteks masyarakat Aceh misalnya, biasanya media tradisional yang digunakan dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas adalah dengan lantunan syair. Sayangnya peneliti tidak menemukan hal ini.

Hal seperti ini juga diakui oleh bagian Humas pemerintah Aceh Utara, bahwa media tradisional juga di gunakan dalam proses komunikasi pembangunan dengan warga, hanya saja sampai saat ini, komunikasi dengan media tersebut sangat sulit ditemukan, walaupun ada adanya di kampung-kampung yang masih jauh dari teknologi.

Kedua, media konvensional, yaitu berupa media modern yang tidak dapat dilakukan sebuah proses timbal balik. Proses komunikasi yang terjadi dalam media ini cenderung bersifat satu arah saja. Jika diidentifikasi, maka terdapat dua media komunikasi konvensional yang digunakan yaitu koran, televisi dan radio. Kendati radio adalah salah satu media yang telah mendalami perubahan dalam hal teknologinya, namun dalam konteks komunikasi pembangunan ini, peneliti melihat bahwa penggunaan media radio hanya masih sebatas pada iklan-iklan pemerintah.

Sama halnya dengan penggunaan koran. Dalam banyak pemberitaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Utara diantaranya ialah melalui iklan advetorial. Sedangkan pemberitaan pembangunan sangat

minim. Dampaknya ialah, masyarakat tidak dapat menjalin sebuah proses komunikasi yang timbal balik menyikapi pemberitaan pembangunan tersebut. *Harian Serambi Indonesia* dan *Rakyat Aceh* adalah dua media cetak yang umumnya digunakan oleh Aceh Utara dalam menyebarkan informasi.

Dan, ketiga ialah komunikasi pembangunan melalui media digital berbasis pada internet. Peneliti dalam hal memilah dua bentuk media digital, yaitu *web site* dan media sosial (*medsos*). Amatan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital belum begitu optimal dan maksimal. Melalui laman resmi Kabupaten Aceh Utara informasi pembangunan juga tidak diberitakan dengan sirkulasi dan jejang waktu yang sering. Informasi yang berada di dalamnya hanya sebatas pada pemberitahuan hal-hal yang tidak terkait dengan pembangunan yang berkenaan dengan masyarakat.

Pemanfaatan *web site* pemerintah Aceh Utara tidak melakukannya dengan maksimal, apalagi melalui media sosial. Temuan penelitian ini berdasarkan pada peninjauan melalui Facebook dan twitter peneliti menemukan pengikut (*fans page*) facebook tidak mencapai tiga ribu jiwa, tidak sebanding dengan pengguna facebook di daerahnya. Sedangkan melalui analisis terhadap kontennya peneliti menemukan bahwa informasi tidak ter-update dengan sirkulasi berita yang tinggi. Sedangkan twitter sebagai media yang tengah mengetrend saat ini pemerintah Aceh Utara tidak membukanya dengan publik. Menurut pengakuan dari pemerintah melalui Humas bahwa group twitter untuk masyarakat sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan warga tidak ada.

Pemilihan dari beragamnya media komunikasi yang tersedia umumnya dilakukan berdasarkan pada karakteristik masyarakat sasaran penerima informasi. Penggunaan media tradisional lumrahnya digunakan pada sasaran masyarakat pedesaan, sedangkan melalui media digital tidak dibatasi oleh ruang, sebab banyak desa saat ini sudah terhubung baik dengan internet.

Kurang optimalnya penggunaan media dalam proses komunikasi pembangunan yang dijalani, dikarenakan cara pendekatan pemerintah baik dalam penyuluhan, perencanaan pembangunan, sosialisasi program dan sebagainya ialah umumnya dilakukannya melalui pendekatan personal melalui komunikasi interpersonal dalam sebuah diskusi dan forum. Cara tersebut dianggap efektif karena dianggap lebih cocok untuk mendengarkan secara langsung maksud dan tujuan program. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh

beberapa pegawai Pemerintahan, bahwa pemerintah masih cenderung menggunakan cara-cara personal dengan pendekatan persuasif. Dengan mengajak diskusi masyarakat wilayah pembangunan, merangkulnya dan melibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bagian dari proses pembangunan.

Media dalam proses komunikasi adalah sebuah sarana dan perantara agar pesan tersampaikan kepada khalayak yang dituju. Dengan PRCA sebagai metode dalam komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan terlihat bagaimana masyarakat melibatkan dirinya dalam pembangunan. partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebuah keharusan, agar pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan serta berkelanjutan. Karena masyarakat (penduduk setempat) adalah pihak yang sangat rentan terhadap permasalahan yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemerintah Aceh Utara sampai dengan ini (tahun 2016-red) belum memiliki model komunikasi pembangunan yang tepat dan relevan dalam proses pembangunan yang partisipatif. Pemerintah Aceh utara masih mengadopsi dari berbagai model komunikasi pembangunan yang ditawarkan oleh berbagai pakar komunikasi pembangunan. Mengingat dengan beragamnya karakteristik masyarakat, luas wilayah cakupan, para pihak yang terlibat dan kelompok kepentingan beragam yang terlibat dalam proses pembangunan di Aceh Utara. Selain itu, Pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Aceh Utara belum mengena secara langsung terhadap partisipasi secara menyeluruh, keterlibatan masyarakat masih sebatas dalam pelaksanaan program kegiatan sebagai pekerja. Semestinya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Bahwa dua model komunikasi pembangunan, yang dominan dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, yaitu *Participation Rural Communication Appraisal* (PRCA) yang cenderung digunakan dalam pembanguna projek-projek pembangunan fisik, seperti pembangun Waduk Krueng Keureto di Desa Paya Bakong Aceh Utara dan lain-lain. *Kedua* model komunikasi pembangunan *Participation Communication Strategy Design* (PCSD) yang umumnya digunakan dalam pembangunan yang bersifat penyuluhan.

Pemanfaatan media konvensional dalam proses penggunaan media komunikasi pembangunan masih lebih mendominasi daripada proses komunikasi menggunakan media digital (internet) seperti web site, media sosial dan media tradisional. Dampak yang ditimbulkan dari pola penggunaan media seperti ini mengakibatkan distribusi informasi pembangunan yang tidak merata. Penggunaan media juga umumnya berdasarkan pada karakteristik masyarakat serta jenis pesan yang akan disampaikan kepada khalayak sasaran.

### **Saran**

Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan, pemertintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sepatutnya melakukan pembenahan terhadap model-model dan sistem komunikasi pembangunan yang mengarah pada keterbukaan informasi sehingga dapat diakses stiap kalangan masyarakat. Dengan menetapkan dan memilih model komunikasi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Pemerintah Aceh Utara, mesti mampu memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, seperti penggunaan internet dan media sosial atau new media untuk mendistribusikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Mengandalkan media komunikasi hanya konvensional tanpa diiringi dengan pemanfaatan media komunikasi kontemporer mengakibatkan terhambatnya pesan sampai kepada masyarakat, serta pesan tidak sampai kepada khalayak secara merata. Selain itu, rupanya media tradisional juga perlu digalakkan kembali, media ini dipercaya dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pendekatan lokal wisdom atau kearifan loka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Irwan Ph.D. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Umum*. DPPPM Dirjen Dikti. Jakarta.
- BPS, *Aceh Utara dalam Angka 2014*
- Dilla Sumadi, 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis
- Faisal, Sanapiah. 2003 *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*, Rajawali. Jakarta

- Hamijoyo, Santoso S. 2006. *Komunikasi Partisipatoris*. Bandung: Humaniora
- Hasan, Erliana, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Hasan, kamaruddin, 2011, Transformasi Konflik Aceh: Dari Perjuangan Bersenjata ke Perjuangan Politik, Jurnal UNSRI.
- Hasan, kamaruddin, 2008, Beranda Perdamaian: *Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (judul tulisan: Pilkada, Partai Lokal dan Masa Depan Aceh (Harapan Berakhirnya Transisi) P2P – LIPI – Pustaka Pelajar
- Hasan, kamaruddin, 2014, *Momentum Fundamental Aceh*, Waspada Senin 7 April 2014 dan beberapa media online
- Hasan, kamaruddin, 2014, *Mampukah Negara bangsa bangkit; Ketika*, cendrawasisPos dan beberapa media onlie
- Jurnal Akta Diurna, 2012 “Model-Model Desain Strategi Komunikasi Pembangunan” yang dikeluarkan melalui jurnal Akta Diurna Vol. 8 No. 2 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Haluoleo.
- Korten, D.C. dan Klauss, R. (ed.) 1984. *People Centered Development : Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Korten, D.C. dan Sjahrir. (ed.). 1993. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Kompas, 16 oktober 2006
- Kompas, 22 September 2006
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Miles, Matthew B. dan Haberman A. Michael. 1992. *Qualitative Data Analysis Data* diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Mahmud, Amir; Model Komunikasi Pembangunan Dalam Penyediaan Prasarana Perdesaan Di Kawasan Pesisir Utara Jawa Tengah (Studi Kasus Desa Morodemak dan Purwosari Kabupaten Demak). Tesis
- Malik, Dedy Djamaluddin, 1991. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Perspektif-Depedensia
- Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2012-2017, pada tanggal 15 Desember 2012 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- Nasution, Zulkarimein, 1998. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



- Patton, Michael Quinn. 1987. *How to Use Qualitative Methods Evaluation*. Sage publications. California.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi keempat. Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- United Nations. 1972. *Planning as A Tool of Development* (dalam Correspondence Course in Social Planning).
- UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)
- Undang-Undang RI No.11 tahun 2006. *Tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta: CV Tamita Utama
- Surna. T.D. dan Harry H. A. 1992. *Kualitas Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kantor Menteri Lingkungan Hidup.
- Soerjani, M. 1992. *Ekologi Sebagai Dasar Pemahaman tentang Lingkungan Hidup*. Serasi No. 24.